

**PERSEPSI GURU TENTANG AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI  
MANAJEMEN KEUANGAN SEKOLAH MENENGAH LANJUTAN ATAS  
(SLTA) NEGERI SE-KOTA PROBOLINGGO**

Diana Fathiyah

Ibrahim Bafadal

Teguh Triwiyanto

Email: diana3fathiyah@gmail.com

Universitas Negeri Malang, Jalan Semarang No. 5 Malang

**Abstract:** The aim of this research is to describe: 1) the level of teachers perceptions of accountability and transparency of financial management; 2) teachers perceptions of accountability of financial management; 3) teachers perceptions of transparency of financial management. This research applied quantitative research and descriptive design. The research result was: 1) the level of teachers' perceptions about accountability and transparency of financial management was categorized as average; 2) the teachers understanding about accountability of school financial management was average; 3) the teacher understanding about transparency of school financial management was average.

**Keywords:** teachers perceptions, accountability, transparency of school financial management.

**Abstrak:** Tujuan penelitian ini yaitu mendeskripsikan: 1) tingkat persepsi guru tentang akuntabilitas dan transparansi manajemen keuangan; 2) persepsi guru tentang akuntabilitas manajemen keuangan; dan 3) persepsi guru tentang transparansi manajemen keuangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan desain deskriptif. Hasil penelitian: 1) tingkat persepsi guru tentang akuntabilitas dan transparansi manajemen keuangan termasuk dalam kategori sedang; 2) Pengetahuan guru mengenai akuntabilitas manajemen keuangan sekolah adalah sedang; dan 3) Pengetahuan guru mengenai transparansi manajemen keuangan sekolah adalah sedang.

**Kata Kunci:** persepsi guru, akuntabilitas, transparansi manajemen keuangan sekolah.

Transparansi dan akuntabilitas manajemen keuangan sekolah sudah selayaknya harus dilakukan sekolah terhadap seluruh *stakeholders* yang ada di sekolah tanpa pengecualian. Terlihat dalam praktik yang ada di sekolah, pihak sekolah berusaha untuk terbuka dengan keuangan sekolah terhadap seluruh pihak internal dan eksternal yang ada di sekolah. Keterbukaan sekolah mengenai manajemen keuangan terutama kepada guru yaitu hanya secara umum saja. Sedangkan akuntabilitas atau bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan sekolah yaitu penyampaian laporan manajemen keuangan di forum rapat guru. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Sutedjo (2009: 92):

“bentuk implikasi itu adalah bahwa sekolah di dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) yaitu mulai perencanaan, pelaksanaan anggaran dan menyusun pelaporan pertanggungjawaban keuangan sekolah harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel dengan melibatkan *stakeholder*. Hal ini bisa dilakukan dengan melibatkan *stakeholder* internal sekolah dalam penyusunan perencanaan, melaksanakan anggaran sesuai perencanaan dan membuat pertanggungjawaban sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan dengan disertai bukti-bukti kuitansi yang sah. Selanjutnya sekolah memberikan laporan kepada publik secara periodik tentang pengelolaan keuangan sekolah sehingga publik bisa memberikan fungsi kontrolnya apabila ada penyimpangan dalam melakukan pengelolaan keuangan sekolah”.

Penyusunan keuangan sekolah tidak hanya dilakukan oleh beberapa pihak sekolah saja, seharusnya juga melibatkan guru yang ada di sekolah tersebut. Sehingga guru memahami pengelolaan keuangan sekolah mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawabannya. Hal ini yang coba diterapkan oleh Sekolah Menengah Lanjutan Atas (SLTA) Negeri Se-Kota Probolinggo.

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut: 1) mendeskripsikan tingkat persepsi guru tentang akuntabilitas dan transparansi manajemen keuangan SLTA Negeri Se-Kota Probolinggo; 2) mendeskripsikan persepsi guru tentang akuntabilitas manajemen keuangan SLTA Negeri Se-Kota Probolinggo; dan 3) mendeskripsikan persepsi guru tentang transparansi manajemen keuangan SLTA Negeri Se-Kota Probolinggo.

Akuntabilitas merupakan sebuah bentuk pertanggungjawaban yang memiliki prinsip-prinsip sebagaimana yang dikemukakan oleh Sutedi (2009: 398-399) yang menyebutkan terdapat beberapa tahapan untuk menjamin terlaksananya akuntabilitas yaitu: tahap proses pembuatan keputusan dan tahap sosialisasi kebijakan. Selain pendapat di atas, ada pendapat lain mengenai prinsip-prinsip akuntabilitas. Seperti yang dipaparkan oleh Shafaratunnisa (2015: 39) yang menyebutkan prinsip akuntabilitas pengelolaan keuangan sekolah meliputi: dokumentasi dan informasi, sesuai standar etika dan nilai-nilai yang berlaku, adanya sasaran kebijakan, tolok ukur, penyebaran informasi, mekanisme pengaduan masyarakat, dan ketersediaan system informasi manajemen dan monitoring. Sedangkan Lalolo (2005: 7) menyatakan prinsip akuntabilitas menuntut pada dua hal, yaitu kemampuan menjawab (*answerability*), dan konsekuensi (*consequences*). Berdasarkan hasil pemaparan prinsip akuntabilitas yang dipakai adalah adanya pembuatan keputusan dan sosialisasi kebijakan dalam manajemen keuangan sekolah; adanya informasi dan dokumentasi tentang manajemen keuangan; pengelolaan manajemen keuangan sekolah disesuaikan dengan peraturan yang berlaku; penyebaran informasi tentang pengelolaan manajemen keuangan sekolah; adanya layanan untuk menjawab pertanyaan publik tentang akuntabilitas manajemen keuangan sekolah; dan adanya sanksi atau hukuman yang diberikan kepada pihak penyalahgunaan keuangan sekolah.

Prinsip transparansi menurut Siregar (2001) menyebutkan bahwa transparansi mengandung prinsip yaitu: mudah dipahami oleh masyarakat dan dikelola secara terbuka dan dipertanggungjawabkan. Berbeda dengan pemaparan di atas, Darmawan (2010: 34) menyebutkan prinsip transparansi memiliki dua aspek, yaitu komunikasi publik oleh pemerintah dan hak masyarakat terhadap akses informasi. Pendapat lain yang menyebutkan prinsip transparansi adalah dikemukakan oleh *Humanitarian Forum Indonesia* (HFI) dalam Rahmawati (2014: 11) sebagai berikut:

“adanya informasi yang mudah dipahami dan diakses (dana, cara pelaksanaan, bentuk bantuan atau program); adanya publikasi dan media mengenai proses kegiatan dan detail keuangan; adanya laporan berkala mengenai pendayagunaan sumber daya dalam perkembangan proyek yang

dapat diakses oleh umum; laporan tahunan; website atau media publikasi organisasi; dan pedoman dalam penyebaran informasi.

Berdasarkan hasil di atas prinsip transparansi yang dipakai adalah (a) informasi yang mudah dipahami dan diakses oleh masyarakat, (b) publikasi mengenai proses kegiatan dan detail keuangan, (c) pelaporan keuangan secara periodik, (d) diterima masyarakat, (e) dikelola secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan, dan (f) dipertanggungjawabkan kepada pemerintah.

## **METODE**

Menurut Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Negeri Malang (2010: 18), rancangan penilitan diartikan sebagai strategi mengatur latar penelitian agar penelitian memperoleh data yang valid sesuai dengan karakteristik variabel dan tujuan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Sedangkan rancangan atau desain penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif dirancang untuk memperoleh informasi tentang status atau gejala pada saat penelitian dilakukan (Zulkarnain, 2007: 46).

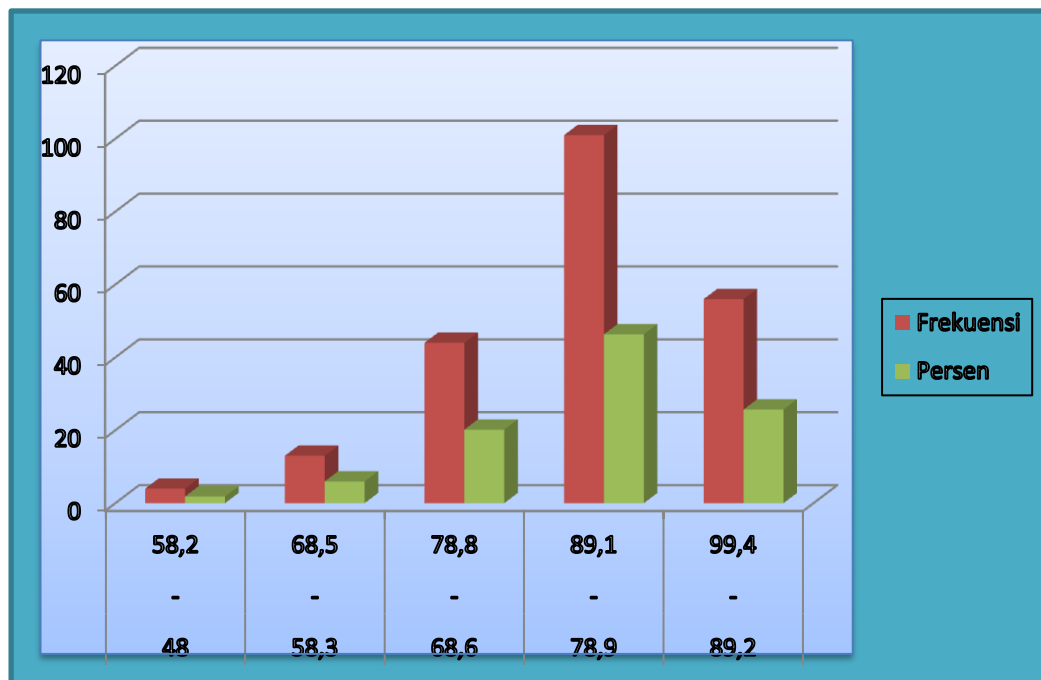
Penelitian ini mengandung dua variable. Dua variabel tersebut adalah yaitu persepsi guru tentang akuntabilitas manajemen keuangan sekolah (X1) dan persepsi guru tentang transparansi manajemen keuangan sekolah (X2). Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode studi kuesioner. Alasan peneliti menggunakan metode studi kuesioner dalam penelitian yaitu peneliti akan mengumpulkan sejumlah jawaban oleh responden yang dihasilkan melalui kuesioner. Kuesioner dalam penelitian ini menggunakan pertanyaan tertutup.

## **HASIL**

### **A. Persepsi Guru Tentang Akuntabilitas Manajemen Keuangan SLTA Negeri Se-Kota Probolinggo**

Hasil pengolahan data untuk terhadap variabel persepsi guru tentang akuntabilitas manajemen keuangan sekolah diukur berdasarkan 22 item instrument menunjukkan nilai: skor rata-rata 85,82; simpangan baku 7,93; skor maksimum 99,00; skor minimum 48,00; dan lebar kelas interval 10,20 (lampiran

4). Selanjutnya data yang diperoleh dari angket berupa skor total dari setiap responden dianalisis menggunakan rumus persentase. Adapun hasil dari pengolahan data menggunakan rumus persentase dapat dilihat melalui Gambar 1. Gambar tersebut menunjukkan hasil analisis persentase (%) berdasarkan frekuensi (f) skor variabel persepsi guru tentang akuntabilitas manajemen keuangan SLTA Negeri Se-Kota Probolinggo.



**Gambar 1 Diagram Distribusi Frekuensi Skor Persepsi Guru Tentang Akuntabilitas Manajemen Keuangan.**

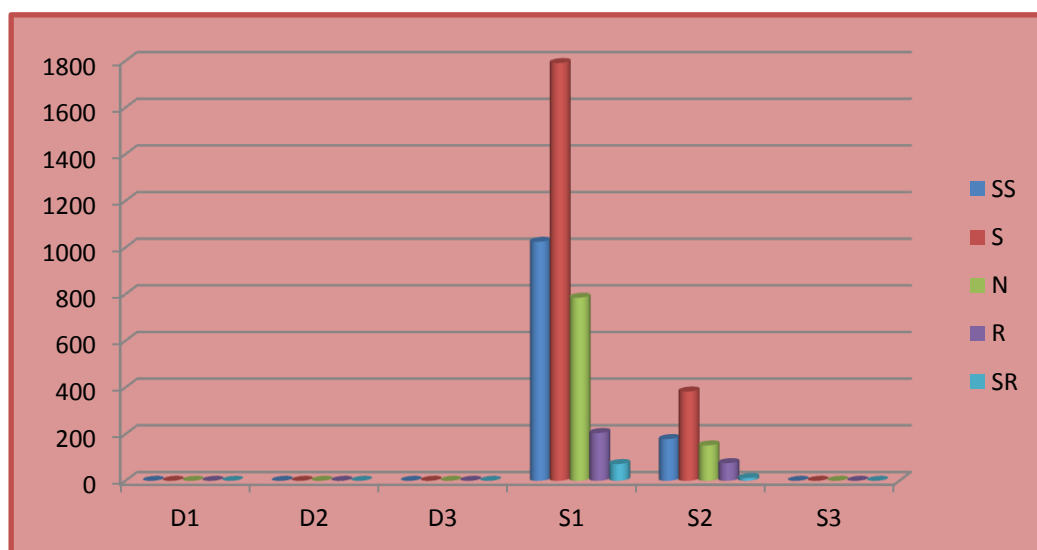
Gambar 1 menunjukkan bahwa 218 responden yang berada dalam interval skor 48,0 s.d. 58,2 sebanyak 4 responden (1,8%); 58,3 s.d. 68,5 sebanyak 13 responden (6,0%); 68,6 s.d. 78,8 sebanyak 44 responden (20,0%); 78,9 s.d. 89,1 sebanyak 101 responden (46,5%); dan 89,2 s.d. 99,4 sebanyak 56 responden (25,7%). Sehingga nilai persentase terbesar atau paling dominan yang diperoleh dari variabel persepsi guru tentang akuntabilitas manajemen keuangan sekolah adalah 46,5% dan berada dalam interval sedang.

Hasil analisis data dari setiap sekolah terhadap variabel tersebut menunjukkan nilai skor dari masing-masing sekolah seperti Tabel 1.

**Tabel 1 Rincian Skor Tiap Sekolah**

Nama Sekolah	Persentase					Persentase Tertinggi	Kategori
	ST	T	N	R	SR		
SMAN 1 PROBOLINGGO	22,1	46,5	19,1	10,7	1,5	46,5	S
SMAN 2 PROBOLINGGO	23,7	56,3	14,6	4,6	0,7	56,3	S
SMAN 3 PROBOLINGGO	24,2	54,8	14,8	5,3	0,9	54,8	S
SMAN 4 PROBOLINGGO	24,1	46,2	23,4	4,0	2,3	46,2	S
SMKN 1 PROBOLINGGO	25,6	40,1	21,9	9,1	3,3	40,1	S
SMKN 3 PROBOLINGGO	32,6	43,6	17,8	5,4	0,6	43,6	S
SMKN 4 PROBOLINGGO	22,6	46,6	24,9	3,8	2,2	46,6	S
MAN 1 PROBOLINGGO	24,3	40,8	25,5	7,1	2,4	40,8	S
MAN 2 PROBOLINGGO	29,8	48,3	18,0	2,1	1,8	48,3	S

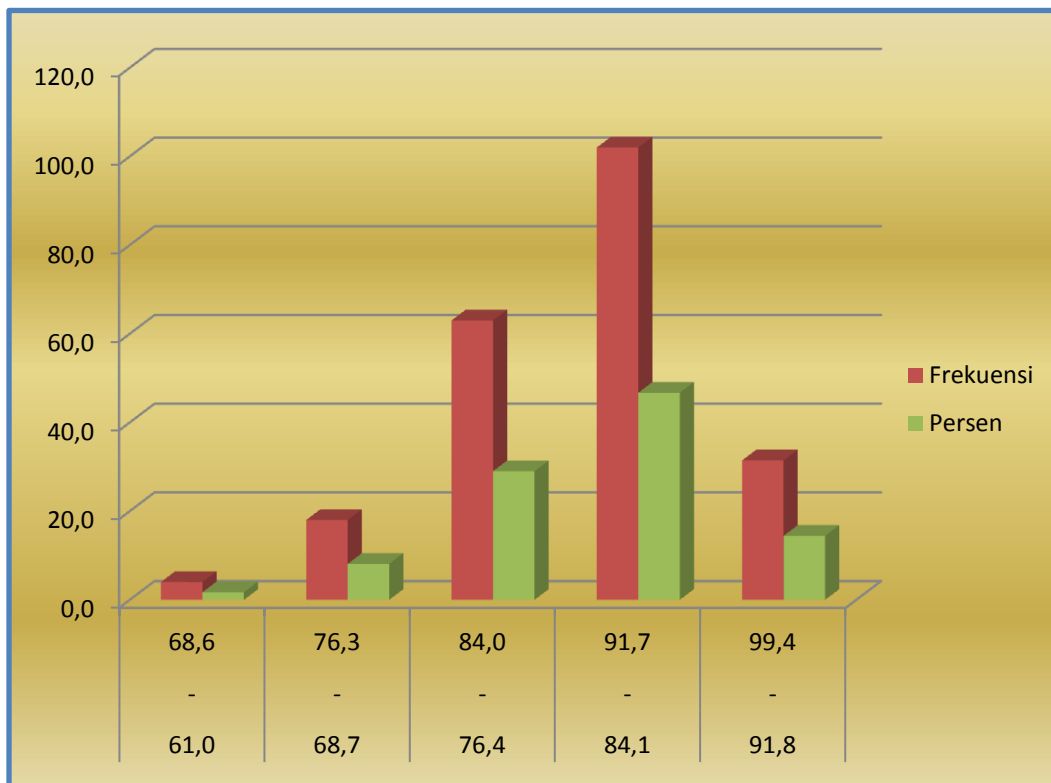
Berdasarkan hasil analisis data Tabel 1 dapat disimpulkan bahwa dari keseluruhan SLTA Negeri Se-Kota Probolinggo secara keseluruhan berada dalam interval sedang. Sekolah yang memperoleh nilai paling tinggi dalam variabel persepsi guru tentang akuntabilitas manajemen keuangan adalah SMAN 2 Probolinggo sebesar 56,3%. Probolinggo. Sekolah tersebut berada dalam interval sedang. Sedangkan menurut jenjang pendidikan hasil analisis data terhadap variabel tersebut dapat disimpulkan bahwa responden yang terbanyak adalah responden yang memiliki jenjang pendidikan S1. Adapun hasil tersebut dapat dilihat pada Gambar 2.



**Gambar 2 Diagram Distribusi Frekuensi Skor Persepsi Guru Tentang Akuntabilitas Manajemen Keuangan Berdasarkan Jenjang Pendidikan.**

## B. Persepsi Guru Tentang Transparansi Manajemen Keuangan SLTA Negeri Se-Kota Probolinggo

Variabel persepsi guru tentang transparansi manajemen keuangan sekolah diukur berdasarkan 24 item instrumen. Hasil analisis data terhadap variabel tersebut menunjukkan nilai: skor rata—rata 87,59; simpangan baku 7,87; skor maksimum 99,00; skor minimum 61,00; dan lebar kelas interval 7,60. Selanjutnya data angket yang berupa skor total dari setiap responden dianalisis menggunakan rumus persentase. Gambar 1 menunjukkan hasil analisis persentase (%) berdasarkan frekuensi (f) skor variabel persepsi guru tentang akuntabilitas manajemen keuangan sekolah.



**Gambar 3 Diagram Distribusi Frekuensi Skor Persepsi Guru Tentang Transparansi Manajemen Keuangan.**

Gambar 3 menunjukkan bahwa 218 responden yang berada dalam interval skor 61,0 s.d.68,8 sebanyak 4 responden (1,7%); 68,7 s.d. 76,3 sebanyak 18 responden (8,1%); 76,4 s.d. 84,0 sebanyak 63 responden (29,0%); 84,1 s.d. 91,7 sebanyak 102 responden (46,7%); dan 91,8 s.d. 99,4 sebanyak 31 responden (14,4%). Sehingga nilai persentase terbesar atau paling dominan yang diperoleh

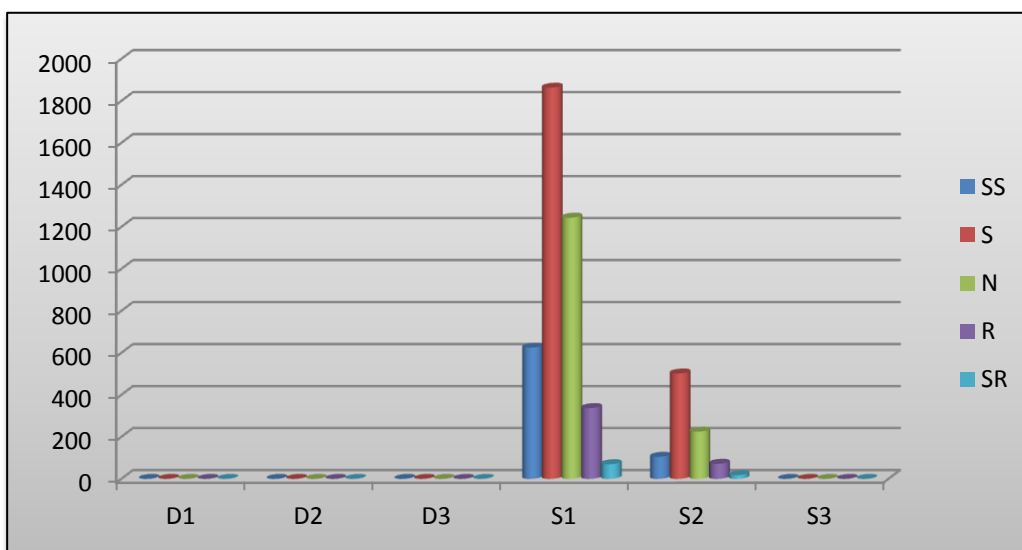
dari variabel persepsi guru tentang akuntabilitas manajemen keuangan sekolah adalah 46,7% dan berada dalam interval sedang.

Hasil analisis data dari setiap sekolah terhadap variabel tersebut menunjukkan nilai skor dari masing-masing sekolah sebagai berikut:

**Tabel 2 Rincian Skor Tiap Sekolah**

Nama Sekolah	Persentase					Persentase Tertinggi	Kategori
	ST	T	N	R	SR		
SMAN 1 PROBOLINGGO	8,7	46,7	28,7	12,4	3,5	46,7	S
SMAN 2 PROBOLINGGO	10,6	58,2	26,0	4,7	0,5	58,2	S
SMAN 3 PROBOLINGGO	16,8	47,6	21,1	13,5	1,0	47,6	S
SMAN 4 PROBOLINGGO	21,1	47,0	24,4	7,0	0,6	47,0	S
SMKN 1 PROBOLINGGO	18,3	41,8	29,4	7,7	2,7	41,8	S
SMKN 3 PROBOLINGGO	16,5	48,8	27,1	7,1	0,5	48,8	S
SMKN 4 PROBOLINGGO	5,5	44,0	43,2	3,1	4,3	44,0	S
MAN 1 PROBOLINGGO	15,8	45,1	25,6	10,3	3,3	45,1	S
MAN 2 PROBOLINGGO	15,8	44,3	29,8	9,4	0,6	44,3	S

Berdasarkan Tabel 2 dapat disimpulkan bahwa dari hasil analisis tersebut dapat diketahui secara keseluruhan di SLTA Negeri Se-Kota Probolinggo berada dalam interval sedang. Adapun nilai persentase tertinggi berdasarkan analisis tersebut sebesar 58,2 % diraih oleh SMAN 2 Probolinggo. Sedangkan menurut jenjang pendidikan hasil analisis data terhadap variabel tersebut, responden terbanyak adalah responden yang memiliki jenjang pendidikan S1. Adapun hasil tersebut dapat dilihat pada Gambar 4.



**Gambar 4 Diagram Distribusi Frekuensi Skor Persepsi Guru Tentang Transparansi Mnjemen Keuangan Berdasarkan Jenjang Pendidikan.**



## **PEMBAHASAN**

### **A. Gambaran Deskriptif Variabel Persepsi Guru Tentang Akuntabilitas dan Transparansi Manajemen Keuangan SLTA Negeri Se-Kota Probolinggo**

Berdasarkan hasil deskripsi data tentang variabel persepsi guru tentang akuntabilitas manajemen keuangan sekolah, ditemukan bahwa tingkat persepsi guru tentang akuntabilitas manajemen keuangan SLTA Negeri Se-Kota Probolinggo termasuk dalam kategori sedang. Nilai Persentase paling terbesar adalah 46,5% atau sebanyak 101 responden dan nilai persentase terkecil adalah 1,8% atau sebanyak 4 responden . Sedangkan berdasarkan jenjang pendidikan, responden sebagian besar berasal dari kalangan pendidikan Sarjana (S1). Selain itu, skor persentase tertinggi setiap sekolah diraih oleh SMAN 2 Probolinggo sebesar 56,3% dan skor persentase terkecil setiap sekolah diraih oleh SMKN 1 Probolinggo sebesar 40,1 %.

Hasil dari deskripsi data tentang variabel persepsi guru tentang transparansi manajemen keuangan sekolah, ditemukan bahwa tingkat persepsi guru tentang transparansi manajemen keuangan SLTA Negeri Se-Kota Probolinggo termasuk dalam kategori sedang. Nilai persentase paling terbesar adalah 46,7% atau sebanyak 102 responden dan nilai persentase paling terkecil adalah 1,7% atau sebanyak 4 responden. Sedangkan berdasarkan jenjang pendidikan, responden sebagian besar berasal dari kalangan pendidikan Sarjana (S1). Selain itu, skor persentase tertinggi setiap sekolah diraih oleh SMAN 2 Probolinggo sebesar 58,2% dan skor persentase terkecil diraih oleh SMKN 1 Probolinggo sebesar 41,8%.

### **B. Persepsi Guru Tentang Akuntabilitas Manajemen Keuangan SLTA Negeri Se-Kota Probolinggo**

Berdasarkan hasil penelitian menyatakan bahwa persepsi guru tentang akuntabilitas manajemen keuangan sekolah adalah sedang. Pengetahuan guru mengenai akuntabilitas atau pertanggungjawaban manajemen keuangan di sekolah adalah sedang. Guru setidaknya sudah memahami atau memiliki pengetahuan yang baik mengenai akuntabilitas manajemen keuangan yang ada di sekolah.

Hasil temuan tersebut menunjukkan bahwa guru di SLTA Negeri Se-Kota Probolinggo memiliki tingkat pembuatan keputusan pengelolaan dana, sosialisasi

pengelolaan dana, informasi penggunaan dana, penyebaran informasi, pengawasan penggunaan dana, layanan menjawab pertanyaan publik terkait dengan penggunaan dana, dan sanksi terhadap penyelewengan dana yang sedang. Sebagaimana pendapat Sutedi (2009: 398-399) yang menyebutkan terdapat beberapa tahapan untuk menjamin terlaksananya akuntabilitas yaitu: tahap proses pembuatan keputusan dan tahap sosialisasi kebijakan. Selain itu pendapat lain dari Shafaratunnisa (2015: 39) yang menyebutkan prinsip akuntabilitas pengelolaan keuangan sekolah meliputi: dokumentasi dan informasi, sesuai standar etika dan nilai-nilai yang berlaku, adanya sasaran kebijakan, tolak ukur, penyebaran informasi, mekanisme pengaduan masyarakat, dan ketersediaan system informasi manajemen dan monitoring. Sedangkan Lalolo (2005: 7) prinsip akuntabilitas menuntut pada dua hal, yaitu kemampuan menjawab (*answerability*), dan konsekuensi (*consequences*).

Maka pihak pengelola dana SLTA Negeri Se-Kota Probolinggo masih perlu meningkatkan tingkat akuntabilitas manajemen keuangan sekolah agar lebih baik dan dapat berkategori tinggi atau sangat tinggi. Sehingga pihak sekolah dapat meningkatkan akuntabilitas manajemen sekolah melalui sosialisai penggunaan dana sekolah setiap semester misalnya, dan mengadakan rapat pertanggungjawaban pengelolaan dana kepada pihak internal sekolah terutama.

### C. Persepsi Guru Tentang Transparansi Manajemen Keuangan SLTA Negeri Se-Kota Probolinggo

Berdasarkan hasil penelitian menyatakan bahwa persepsi guru tentang transparansi manajemen keuangan sekolah adalah sedang. Pengetahuan guru mengenai transparansi atau keterbukaan manajemen keuangan di sekolah adalah sedang. Guru setidaknya sudah memahami atau memiliki pengetahuan yang baik mengenai transparansi manajemen keuangan yang ada di sekolah.

Hasil temuan tersebut menunjukkan bahwa gruru di SLTA Negeri Se-Kota Probolinggo memiliki tingkat pemberian informasi, publikasi, pelaporan keuangan, keterbukaan penggunaan dan pengelolaan kepada masyarakat, dan pertanggungjawaban yang sedang. Sebagaimana pendapat dari Siregar (2001) menyebutkan bahwa transparansi mengandung prinsip yaitu: mudah dipahami oleh masyarakat dan dikelola secara terbuka dan dipertanggungjawabkan. Selain

itu pendapat lain dikemukakan oleh *Humanitarian Forum Indonesia* (HFI) dalam Rahmawati (2014: 11) sebagai berikut:

“adanya informasi yang mudah dipahami dan diakses (dana, cara pelaksanaan, bentuk bantuan atau program); adanya publikasi dan media mengenai proses kegiatan dan detail keuangan; adanya laporan berkala mengenai pendayagunaan sumber daya dalam perkembangan proyek yang dapat diakses oleh umum; laporan tahunan; website atau media publikasi organisasi; dan pedoman dalam penyebaran informasi”.

Maka pihak pengelola dana sekolah di SLTA Negeri Se-Kota Probolinggo masih perlu meningkatkan tingkat transparansi manajemen keuangan sekolah agar lebih baik dan dapat berkategori tinggi atau sangat tinggi. Sehingga pihak sekolah dapat meningkatkan transparansi manajemen sekolah melalui sosialisasi penggunaan dana sekolah setiap semester baik kepada pihak intern maupun ekstern. dan penyebaran informasi penggunaan serta pengelolaan dana secara terbuka kepada semua pihak.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Tingkat persepsi guru tentang akuntabilitas manajemen keuangan SLTA Negeri Se-Kota Probolinggo termasuk dalam kategori sedang. Nilai Persentase paling terbesar adalah 46,5% atau sebanyak 101 responden dan nilai persentase terkecil adalah 1,8% atau sebanyak 4 responden . Sedangkan berdasarkan jenjang pendidikan, responden sebagian besar berasal dari kalangan pendidikan Sarjana (S1). Skor persentase tertinggi setiap sekolah diraih oleh SMAN 2 Probolinggo sebesar 56,3% dan skor persentase terkecil setiap sekolah diraih oleh SMKN 1 Probolinggo sebesar 40,1 %. Sedangkan tingkat persepsi guru tentang transparansi manajemen keuangan SLTA Negeri Se-Kota Probolinggo termasuk dalam kategori sedang. Nilai persentase paling terbesar adalah 46,7% atau sebanyak 102 responden dan nilai persentase paling terkecil adalah 1,7% atau sebanyak 4 responden. berdasarkan jenjang pendidikan, responden sebagian besar berasal dari kalangan pendidikan Sarjana (S1). Selain itu, skor persentase tertinggi setiap

sekolah diraih oleh SMAN 2 Probolinggo sebesar 58,2% dan skor persentase terkecil diraih oleh SMKN 1 Probolinggo sebesar 41,8%.

Persepsi guru tentang akuntabilitas manajemen keuangan sekolah adalah sedang. Pengetahuan guru mengenai akuntabilitas atau pertanggungjawaban manajemen keuangan di sekolah adalah sedang. Guru setidaknya sudah memahami atau memiliki pengetahuan yang baik mengenai akuntabilitas manajemen keuangan yang ada di sekolah.

Persepsi guru tentang transparansi manajemen keuangan sekolah adalah sedang. Pengetahuan guru mengenai transparansi atau keterbukaan manajemen keuangan di sekolah adalah sedang. Guru setidaknya sudah memahami atau memiliki pengetahuan yang baik mengenai transparansi manajemen keuangan yang ada di sekolah.

### **Saran**

Bagi Walikota Probolinggo diharapkan mampu memanfaatkan penelitian hasil ini sebagai bahan pertimbangan dalam membuat dan menentukan kebijakan pembiayaan pendidikan di SLTA Negeri Se-Kota Probolinggo. Bagi Penentu Kebijakan di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama (Kemenag) Kota Probolinggo diharapkan mampu memanfaatkan hasil penelitian ini sebagai bahan pertimbangan dalam rangka penyelenggaraan berbagai program pendidikan seperti pembinaan dan pelatihan mengenai manajemen keuangan sekolah terutama dalam hal penggunaan dana secara transparan sehingga penggunaan dan pengelolaan manajemen keuangan sekolah di lembaga pendidikan Kota Probolinggo lebih optimal. Bagi Kepala SMA/SMK/MA Negeri Se-Kota Probolinggo diharapkan lebih meningkatkan pengetahuannya tentang manajemen keuangan sekolah supaya guru tentang transparansi manajemen keuangan sekolah lebih baik serta lebih optimal. Selain itu untuk mengurangi tindak penyelewengan dana sekolah serta memberikan sanksi atau hukuman kepada pelaku penyelewengan tersebut. Upaya yang dapat dilakukan oleh kepala sekolah dengan cara melaksanakan berbagai macam teknik, pendekatan atau strategi yang baik, efektif serta efisien. Guru SMA/SMK/MA Negeri Se-Kota Probolinggo hendaknya masih perlu meningkatkan kemampuan untuk memahami tentang transparansi manajemen keuangan sekolah. Guru juga diharapkan lebih aktif

dalam menanggapi manajemen keuangan sekolah sehingga mengurangi tindak penyalahgunaan dana sekolah. Selain itu guru juga harus memahami pedoman penggunaan dan pengelolaan manajemen keuangan sekolah sesuai dengan pedoman yang berlaku di lembaga pendidikan. Sedangkan aspek transparansi manajemen keuangan yang perlu ditingkatkan, yaitu: pemberian informasi, publikasi, pelaporan keuangan, keterbukaan penggunaan dan pengelolaan kepada masyarakat, dan pertanggungjawaban. Bagi Ketua Jurusan Administrasi Pendidikan diharapkan Ketua Jurusan Administrasi Pendidikan dapat menjadikan Akuntabilitas dan Transparansi Manajemen Keuangan Sekolah sebagai matakuliah serta perbaikan terhadap matakuliah Akuntabilitas Pendidikan. Peneliti Lain dapat menjadikan hasil analisis dan temuan penelitian ini sebagai bahan perbandingan untuk dikaji ulang serta dilakukan penelitian lanjutan dengan variabel-variabel lain yang belum tercakup dalam penelitian ini.

#### **DAFTAR RUJUKAN**

- Sutedjo. 2009. *Persepsi Stakeholders Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Sekolah (Studi Kasus di Sekolah Menengah Pertama Standar Nasional Kabupaten Kendal)*. Tesis tidak diterbitkan. Bandung: Universitas Diponegoro, Program Pascasarjana, Program Studi Magister Akuntansi.
- Sutedi, A. 2009. *Implikasi Hukum Atas Sumber Pembiayaan Daerah dalam Kerangka Otonomi Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Shafaratunnisa, F. 2015. *Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Stakeholders di SD Islam Binakheir*. Skripsi tidak diterbitkan. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Manajemen Pendidikan.
- Siregar, B. & Siregar, B. 2001. *Akuntansi Pemerintahan dengan Sistem Dana*, Edisi Ketiga. Yogyakarta: STIE, YKPPN.
- Lalolo, LK. 2005. *Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi*. Jakarta: Sekretariat Good Public Governance Bappenas.
- Darmawan. 2010. *Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Keuangan Madrasah (Pada MTs. Negeri Se-Kabupaten Bandung)*. Tesis tidak diterbitkan. Jakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA), Lembaga Administrasi Negara, Program Magister Ilmu Administrasi, Manajemen Keuangan.
- Rahmawati, E.N. 2015. *Hubungan Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Dengan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi Kasus*

*Desa Candi Mas, Kecamatan Abung Selatan, Lampung Utara*). Skripsi. Lampung: Universitas Lampung, Jurusan Ilmu Pemerintahan.  
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015 tentang *Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah*.

Zulkarnain, W. 2007. *Hubungan Kreativitas Guru, Keefektifan Komunikasi, dan Iklim Sekolah dengan Kinerja Guru Madrasah Aliyah Negeri di Malang Raya*. Tesis. Malang: Program Pascasarjana, Program Studi Manajemen Pendidikan, Universitas Negeri Malang. Tidak diterbitkan.